

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Baja merupakan bahan penting dalam pembangunan di sebuah negara, atas perannya yang sangat penting tersebut, keberadaan industri baja menjadi sangat strategis untuk kemakmuran bagi suatu negara. Karena hal tersebut maka terciptalah Industri baja sebagai pengolah bahan-bahan mineral mentah menjadi baja. Industri baja sendiri mempunyai peran utama dalam memasok bahan-bahan baku vital untuk pembangunan di berbagai bidang mulai dari penyedia infrastruktur negara (gedung, jalan, jembatan, jaringan listrik dan telekomunikasi), produksi barang modal (mesin-mesin pabrik dan material pendukung serta *spare partnya*), alat transportasi (kapal laut, kereta api beserta relnya dan otomotif), hingga persenjataan militer negara (tank, senjata api). Indonesia adalah negara dengan sumber daya yang sangat melimpah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, dengan kekayaan yang luar biasa itu Indonesia dapat menjadi salah satu negara pengespor bahan tersebut. Di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional menyebutkan bahwa industri baja merupakan basis industri manufaktur. (Hasni & Manulang, 2017)

Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, terlibat dalam kerjasama Bilateral maupun Multilateral dengan negara-negara lain di kancah internasional. Keterlibatan Indonesia dalam kerjasama internasional baik Bilateral maupun Multilateral tersebut tentunya tidak terlepas dari tujuan politik luar negeri Indonesia yang memiliki kepentingan nasional di dalamnya. Dengan demikian, Indonesia dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari kerjasama yang dilakukan, khususnya ketika kerjasama dilaksanakan dengan negara-negara yang memiliki kemampuan lebih dalam bidang politik, ekonomi ataupun keamanan. Amerika

Serikat, dalam konteks ini menjadi salah satu partner penting dalam kerjasama Bilateral yang dilakukan Indonesia. Hubungan Bilateral Indonesia dan Amerika Serikat telah lama terjalin, bahkan sejak awal Kemerdekaan Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, walaupun dengan adanya pasang surut dalam hubungan Bilateral tersebut. Hubungan Indonesia – Amerika Serikat dapat dianalogikan seperti “*when love and hate collide*” dimana hubungan kedua negara ini mengalami pasang surut dan perbedaan yang cukup signifikan pada masa pemerintahan presiden-presiden Indonesia. (Puspita, 2014)

AS merupakan mitra dagang terbesar ke-4 bagi Indonesia setelah China, Jepang, dan Singapura. Sebaliknya, Indonesia merupakan mitra dagang terbesar ke-28 bagi AS. Lima negara yang merupakan mitra dagang terbesar AS adalah Kanada, China, Meksiko, Jepang, dan Jerman. Ekspor Indonesia ke AS meningkat 2,6% dari 18,9 miliar dollar AS tahun 2013 ke 19,4 miliar dollar AS tahun 2015. (Internasional & Serikat, 2017)

Indonesia sendiri memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan Industri baja, hal ini didasarkan pada data konsumsi baja Indonesia per kapita yang dapat dibilang cukup tinggi. Pada tahun 2013, konsumsi baja Indonesia mencapai 61,6 kg per kapita per tahun dan menempati urutan ke-6 diantara negara-negara ASEAN. Konsumsi per kapita Industri baja suatu negara dihitung dari jumlah produksi baja kasar dibagi dengan jumlah penduduk negara tersebut. Bahkan sekarang konsumsi baja Indonesia terus meningkat, hal itu dikarenakan pembangunan infrastruktur cepat dan *massive* serta merata yang direncanakan oleh pemerintah. Industri baja Indonesia dapat dikelompokkan dalam empat rangkaian besar yang dimulai dari Hulu sebagai Industri pengolahan bijih besi sampai kepada rangkaian Hilir yaitu Industri produk-produk akhir pengolahan besi dan baja. Empat kelompok besar tersebut adalah *ironmaking* (IM), *steelmaking* (SM), *rolling* (R) dan *formatting/cutting/coating* (FC). (Bank Indonesia, 2014)

Berperan sebagai salah satu Eksportir mineral terbesar di dunia, negara Indonesia telah menjadi pemasok penting kebutuhan komoditas mineral di beberapa negara. Namun pada 12 Januari 2014 lalu, larangan ekspor bahan mineral mentah diberlakukan oleh pemerintah negara Indonesia, hal tersebut adalah penegasan dari undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Tentu saja, larangan Ekspor mineral mentah yang diterapkan Indonesia mulai 12 Januari 2014 silam langsung merebut perhatian dunia. Hal tersebut dikarenakan bagi negara yang menjadi salah satu Eksportir mineral terbesar melakukan *Proteksionisme*, maka negara Importir akan kebingungan karena tidak lagi menerima Impor dari negara pemilik barang tersebut. Kepentingan nasional yang berbeda-beda dari setiap negaralah yang menjadi salah satu faktor pendorong suatu negara untuk melakukan tindakan Proteksi dan Monopoli terhadap komoditi utama yang sangat diperlukan oleh negara-negara didunia untuk menguasai pasar dan memperoleh keuntungan maksimal. (Bank Indonesia, 2014)

Ekspor produk besi baja Indonesia ke AS pada tahun 2017 tercatat sebesar USD 112,7 juta atau hanya 0,3% pangsa pasar AS. Nilai ini disebabkan oleh penerapan bea masuk *Antidumping* dan *Countervailing duty* yang telah berlangsung cukup lama. Sementara Ekspor aluminium tahun 2017 ke AS tercatat sebesar USD 212 juta dan pangsa pasar 1,2%. Bagi Indonesia, nilai Ekspor tersebut berkontribusi terhadap 50% Ekspor aluminium Indonesia ke dunia. (Bank Indonesia, 2014)

Amerika Serikat merupakan negara adikuasa yang selalu menjadi sorotan dunia internasional baik dari aspek politik, ekonomi maupun militer. Amerika Serikat sering menjadi tolak ukur dunia dalam berbagai aspek, dimana setiap pergantian kepemimpinan menjadi hal yang menarik dan sorotan dalam berbagai media cetak maupun elektronik di dunia. Terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat pada 2016 lalu menjadi babak baru bagi negara dengan julukan super power tersebut. Dengan slogan *Make America Great Again* yang

artinya membuat Amerika kembali berjaya, menarik perhatian warga Amerika yang pada akhirnya membawa Donald John Trump dari Partai Republik melangkah ke Gedung Putih. (Ventura, 2016)

Pada era globalisasi saat ini, kondisi internasional mengarah pada liberalisme institusional dengan berbagai macam bentuk kerjasama, seperti kerjasama dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya, dan lain-lain. Adanya sebuah institusi internasional yang menjadi tempat dan tujuan para negara untuk melakukan hubungan internasional dengan berorientasi pada keuntungan dalam sistem internasional. Kaum liberalisme institusional mempercayai bahwa hubungan kerjasama yang diciptakan dalam institusi internasional dapat mencegah adanya perang dalam negara - negara yang terlibat di dalamnya (Papa, 2017). Sehingga pada dewasa ini, banyak negara tergabung dalam organisasi dan institusi internasional untuk memperoleh keuntungan dari kerjasama – kerjasama yang dilakukan. Begitupun dengan Amerika Serikat yang sudah terlibat dalam berbagai Organisasi dan Institusi internasional.

Keadaan ekonomi global saat ini menganut pada sistem ekonomi liberal yang juga disebut sistem ekonomi pasar bebas dimana setiap unit pelaku kegiatan ekonomi memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Ditandai dengan adanya tren perdagangan bebas dimana Perdagangan bebas lebih mengacu kepada kebijakan pemerintah yang tidak mengganggu arus perdagangan dan menghilangkan hambatan dalam perdagangan baik bersifat hambatan tarif (*tariff barrier*) maupun non-tarif (*non-tariff barrier*) (Kemendag, 2014). Amerika Serikat termasuk negara yang mendukung sistem ekonomi liberal, dimana ia telah terlibat dalam perdagangan bebas dunia. Perjanjian perdagangan telah dilakukannya sejak dahulu dengan tujuan kemakmuran. Beberapa pakta perdagangan yang telah dilakukannya seperti *World Trade Organisation*

(WTO), *North American Free Trade Agreement* (Nafta) , *Trans Pacific Partnership* (TPP), *Transatlantic Trade and Investment Partnership* (TTIP). (Kemendag, 2014)

Di tengah gencarnya dunia internasional yang melakukan berbagai kerjasama yang dikemas dalam kerjasama multilateral dan tren perdagangan bebas untuk memajukan prekonomian global, berbanding terbalik dengan kebijakan ekonomi Donald Trump sebagai Presiden AS yang baru. Seperti janjinya ketika kampanye bahwa ia akan melakukan kebijakan proteksionis terhadap perekonomian AS. Dalam Kamus Ekonomi, proteksionisme diartikan dalam dua hal. Pertama, proteksionisme merupakan paham perlindungan terhadap dunia usaha yang dilakukan pemerintah. Kedua, proteksionisme adalah kebijakan yang disengaja oleh pemerintah sebagai upaya pengendalian terhadap impor atau ekspor, dengan jalan mengatasi berbagai hambatan perdagangan, seperti tarif kuota, yang bertujuan untuk melindungi industri atau dunia usaha dalam negeri dari persaingan dengan industri luar negeri. (Sumadji, 2006)

Kebijakan politik perdagangan Donald Trump dalam rangka mewujudkan slogan kampanyenya, *Make America Great Again*, seakan menjadi sumber permasalahan perdagangan internasional dan ekonomi dunia, khususnya di pertengahan tahun 2018. Kebijakan Donald Trump telah memicu perang dagang antara 3 (tiga) kekuatan besar ekonomi dunia yaitu Amerika Serikat, China dan Uni Eropa. (Gandara, 2019)

Kebijakan Trump mengenakan tarif impor untuk baja dan aluminium merupakan sebuah bentuk dari *Proteksionisme*. Kebijakan ekonomi yang mengetatkan perdagangan antar negara melalui cara-cara seperti tarif barang impor, batas kuota, dan berbagai peraturan pemerintah yang dirancang untuk menciptakan persaingan adil (menurut para pendukungnya) antara barang & jasa impor dan barang & jasa dalam negeri. (Maret & As, 2018)

Kebijakan Tarif Trump adalah serangkaian tarif yang dikenakan selama kepresidenan Donald Trump sebagai bagian dari kebijakan ekonominya. Pada Januari 2018, Trump

memberlakukan tarif pada panel surya dan mesin cuci sebesar 30% hingga 50%. Kemudian pada tahun yang sama ia mengenakan tarif Impor atas baja 25% dan aluminium 10% dari sebagian besar negara. Pada 1 Juni 2018, penenaan tarif ini diperluas kepada Uni Eropa, Kanada, dan Meksiko. Satu-satunya negara yang tetap dikecualikan dari tarif baja dan aluminium adalah Australia dan Argentina. Secara terpisah, pada 6 Juli, administrasi Trump menetapkan tarif 25% pada 800 kategori barang yang di Impor dari China senilai 50 miliar USD. Morgan Stanley memperkirakan bahwa tarif Trump untuk baja, aluminium, mesin cuci, dan panel surya, pada Maret 2018, mencakup 4,1% Impor AS. (Gandara, 2019)

Sejak masa kampanye Donald Trump telah mengindikasikan bahwa Amerika Serikat menerapkan ekonomi berbasis *Proteksionisme*. Hal tersebut semakin terlihat dengan memburuknya hubungan ekonomi AS-China yang mengarah pada perang dagang. Pemerintahan Presiden Donald Trump mengenakan tarif Impor sebesar US\$50-US\$60 miliar untuk sejumlah produk China yang masuk ke Amerika dalam upaya memperbaiki perekonomian dalam negeri dan mengurangi defisit neraca perdagangan kedua negara. Presiden Trump mengumumkan menaikkan tarif Impor hingga 15% untuk baja dan 10% untuk aluminium. Selain penenaan tarif Impor, AS juga berencana untuk membatasi investasi dan mengambil tindakan untuk China di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/ WTO) karena menganggap negara tersebut bersikap tidak adil dalam perdagangan Bilateral. Pemerintah China membalas tindakan AS dengan menaikkan tarif Impor hingga 25% terhadap produk Impor AS dan akan membawa masalah ini juga ke WTO. (Pujayanti, 2018)

Di tingkat global, perang dagang dua negara berpengaruh ini dapat memicu pelemahan ekonomi dunia dan berimplikasi pada Indonesia. Kebijakan Presiden Donald Trump menerapkan tarif Impor bisa menjadi bumerang bagi AS. China bukan satu-satunya negara yang mendapat ancaman penangguhan tarif Impor baja dan aluminium. Meskipun akhirnya

dibatalkan, Presiden Trump juga mengarahkan kebijakannya tersebut kepada mitra dagang utamanya di Uni Eropa, Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Meksiko, dan Korea Selatan hingga 1 Mei 2018. Alih-alih mendapat keuntungan, AS akan mendapat tentangan dari negara-negara lain yang membalas juga dengan kebijakan tarif Impor baru. (Pujayanti, 2018)

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat pada saat ini yaitu Trump Tariffs hanya berlaku di negara-negara tertentu, bagi Impor baja dan aluminium sendiri Amerika Serikat memberlakukan tarif itu untuk negara seperti Cina, Uni Eropa, Kanada, Mexico serta negara-negara lainnya. Indonesia sendiri tidak termasuk dalam negara yang diberlakukan Trump Tariffs. Namun meskipun Amerika Serikat hanya memberlakukan tarif kebijakan Impor bagi beberapa negara saja (terutama Cina), dampak yang diberikan mungkin saja akan menjalar ke negara-negara lainnya di dunia. Terlebih dengan negara-negara yang mempunyai hubungan politik dan ekonomi dengan Cina dan Amerika Serikat sendiri dimana Indonesia adalah negara yang berada di dalam lingkup tersebut. (Susanto, 2015)

Seberapa besar peluang itu bisa diambil tentunya ini sangat tergantung. Hal ini disebabkan, adanya potensi dimana tidak menutup kemungkinan AS pun akan menerapkan tarif tinggi untuk beberapa komoditas Ekspor Indonesia ke AS, misalnya seperti: produk-produk yang saat ini masih dikenakan tarif 0% seperti karet, udang, dan furniture dan beberapa produk yang telah dimiliki substitusi nya oleh AS seperti minyak sawit (*biofuell*). Faktor yang lain adalah dikarenakan daya saing perdagangan Indonesia yang terus menurun khususnya menghadapi kompetisi dari negara lain yang memiliki produk sejenis. Misalnya, untuk produk pakaian dan alas kaki. Selama ini competitor terkuat adalah Vietnam yang pertumbuhan Ekspor ke AS mencapai 4,6% di tahun 2017. Sedangkan Indonesia terus mengalami penurunan. Produk lainnya adalah otomotif dan elektronik. Untuk otomotif saingan terberatnya adalah Thailand, dan elektronika dengan Malaysia serta Vietnam. (Defisit, 2018)

Soal daya saing ini menjadi penting untuk diperhatikan. Karena sebesar apa pun peluang pasar yang ada tetapi daya saing Indonesia tetap rendah, maka akan sulit sekali bagi Indonesia untuk mengambil manfaat dari perang dagang. Berdasarkan analisis melalui metode Revealed Comparative Advantage (RCA) yang dicuplik oleh Core Indonesia dari Laporan UNCTAD pada 2016, menyebutkan bahwa Indonesia hanya kompetitif dengan negara-negara seperti Meksiko, Chile, dan Peru. Tetapi daya saing dengan negara seperti Filipina, Vietnam, Thailand, Australia dan Malaysia kita sangat rendah. (Defisit, 2018)

Jika perang dagang antara Amerika dan China berlangsung terus menerus, maka akan menimbulkan kekhawatiran dari beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia. Bagi Indonesia, situasi ini diibaratkan dua sisi mata pisau, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Positifnya, perang tarif kedua negara ini dapat menjadi keuntungan bagi Indonesia, dimana Indonesia dapat menggantikan posisi kedua negara tersebut dalam memasok produk ke Amerika dan China. Sisi Negatifnya, apabila barang dari China tidak bisa masuk ke Amerika maupun sebaliknya akibat tingginya tarif bea masuk, pastinya China dan Amerika akan mencari tujuan negara baru untuk Ekspor produk mereka supaya tidak menimbulkan *over supply* di dalam negeri. Asia Tenggara khususnya Indonesia merupakan pasar yang potensial serta memiliki bea masuk yang murah bila dibandingkan dengan Amerika/China. (Anggaran, 2018)

Sebagai contoh, jika produk besi baja dan aluminium China yang semula untuk pasar Amerika namun kemudian beralih menjadi masuk ke Indonesia, dapat dipastikan akan mengancam Industri Hulu di sektor tersebut di dalam negeri karena susah-bersaingnya dengan harga yang ditawarkan oleh China. Akan tetapi di sisi lain, Industri Hilir yang menggunakan besi baja tentunya akan diuntungkan karena memperoleh harga yang murah, apalagi proyek infrastruktur yang sempat menjadi program prioritas pemerintah masih banyak yang belum selesai dan ini sangat tergantung terhadap produk Impor. Defisit perdagangan Indonesia



dengan China pada tahun 2015 melonjak 100 persen dari tahun 2013, menjadi US\$17,4 miliar. (Anggaran, 2018)

Sementara itu, kelebihan perdagangan Indonesia dengan Amerika justru mengalami tren kenaikan dalam lima tahun terakhir dengan rata-rata sebesar US\$8,42 miliar setiap tahunnya. Indonesia harus betul-betul mewaspadaai dampak dari perang dagang Amerika dengan China, agar tidak menambah defisit neraca perdagangan Indonesia sebagai akibat dari defisit neraca perdagangan dengan China bertambah besar, sementara surplus yang didapatkan dari Amerika menjadi berkurang. (Anggaran, 2018)

Dari hal-hal yang telah diungkap diatas, penulis ingin mencari tahu adakah dampak dari kebijakan *Trump Tariffs* tersebut terhadap ekspor baja Indonesia ke Amerika Serikat hingga akhirnya membuat Skripsi dengan judul: **“Dampak Kebijakan *Trump Tariffs* Terhadap Ekspor Baja Indonesia ke Amerika Serikat”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas, maka penulis mengemukakan Identifikasi Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Latar Belakang dikeluarkannya Kebijakan *Trump Tariffs*?
2. Bagaimana Kondisi Ekspor Baja Indonesia ke Amerika Serikat Sebelum Keluarnya Kebijakan *Trump Tariffs*?
3. Bagaimana Kondisi Ekspor Baja Indonesia ke Amerika Serikat Pasca Keluarnya Kebijakan *Trump Tariffs*?

### **1.2.1 Pembatasan Masalah**

Melihat luasnya permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan ini dengan melihat pengaruh Ekspor baja Indonesia ke Amerika Serikat sejak diberlakukan kebijakan *Trump Tariffs* sepanjang tahun 2018.

## **1.2.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: **“Bagaimana Dampak Implementasi Kebijakan Trump Tariffs Terhadap Ekspor Baja Indonesia ke Amerika Serikat?”**

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kebijakan Trump Tariffs terhadap Ekspor baja Indonesia ke Amerika Serikat;
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kebijakan Trump Tariffs terhadap Ekspor baja Indonesia ke Amerika Serikat;
3. Untuk mengetahui cara Indonesia menyikapi kebijakan Trump Tariffs terhadap Ekspor baja ke Amerika Serikat.

### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial di Universitas Pasundan Bandung.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun aplikatif bagi masyarakat dan akademisi pada umumnya serta bagi penulis pada khususnya, dan
- c. Secara khusus memberikan informasi kepada pihak-pihak lain yang berminat untuk meneliti masalah yang sama dengan penelitian ini serta menjadi sebuah referensi bagi pihak-pihak yang ingin mengembangkan atau meneliti lebih lanjut mengenai

dampak kebijakan Trump Tariffs terhadap ekspor baja Indonesia ke Amerika Serikat.